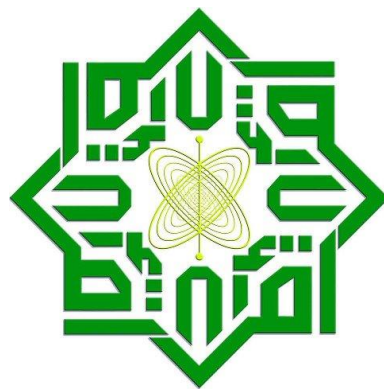


SKRIPSI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA
PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
KABUPATEN KAMPAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Compreherensif Dalam Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas
Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH:

LENA

10873004323

JURUSAN AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
PEKANBARU
2012

ABSTRAK
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA PARTISIPASI
MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN
KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR

Oleh:
LENA
10873004323

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Koto Kampar hulu Kabupaten Kampar, dengan sampel sebanyak 98 Kepala Keluarga (KK) dengan menggunakan teknik kuesioner yang dibagikan kepada Kepala Keluarga.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini bahwa (1) Tingkat pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, dapat dilihat dari hasil pengolahan SPSS diperoleh t hitung $-0.018 < t$ tabel $1,986$.(2)Penyuluhan mengenai pajak berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, dapat dilihat dari hasil pengolahan SPSS diperoleh t hitung $2.022 > t$ tabel $1,986$.(3)Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, dapat dilihat dari pengolahan SPSS diperoleh hasil t hitung $2,915 > t$ tabel $1,986$.(4)Kelompok Umur berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, dapat dilihat dari pengolahan SPSS diperoleh hasil t hitung $9,830 > t$ tabel $1,986$ Sedangkan secara simultan ketiga variabel bebas tingkat pendidikan, penyuluhan mengenai pajak tingkat pendapatan dan Kelompok Umur. secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, dapat dilihat dari hasil SPSS f hitung $42,450 > f$ tabel $2,470$. Dari hasil pengolahan data diperoleh r dan r squared sebesar $0,646$ atau $64,6\%$, sedangkan sisanya sebesar $35,4\%$ dipengaruhi variabel lain.

Kata Kunci : Tingkat Pendidikan, Penyuluhan Mengenai Pajak, Tingkat Pendapatan dan Kelompok Umur.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Perumusan Masalah.....	6
1.3	Tujuan Penelitian.....	7
1.4	Manfaat Penelitian.....	7
1.5	Sistematika Penulisan.....	8

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1	Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	10
2.2	Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak.....	11
2.3	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	15
2.4	Pajak Menurut Pandangan Islam	17
2.5	Sejarah Pemungutan Pajak	18
2.6	Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan	19
2.7	Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	19
2.8	Dasar Hukum Penerimaan Pajak	20
2.9	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	21
2.10	Kerangka Teoritis	23
2.11	Pengembangan Hipotesis	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Lokasi Penelitian	28
3.2	Sumber Data	28
3.3	Populasi dan Sampel	29
3.4	Teknik Pengumpulan Data	32
3.5	Depenisi Variabel Operasional dan Pengukurannya	32
3.6	Metode Analisis Data	35
3.7	Pengujian Kualitas Data	36
3.8	Uji Asumsi Klasik	39
3.9	Pengujian Hipotesa.....	41

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Kuesioner dan Demografi Responden	44
4.2	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	47
4.3	Analisi Data Penelitian	55
	1. Hasil Statistik Deskriptif Variabel.....	51
	2. Hasil Uji Normalitas Data.....	52
4.4	Hasil Uji Asumsi Klasik	57
	1. Uji Multikolinearitas	57
	2. Uji Heteroskedastisitas	58
4.5	Analisi Hasil Regresi	61
	1. Uji Secara Parsial Uji T	63
	2. Uji Secara Simultan Uji F	68
	3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	71
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan.....	72
5.2	Keterbatasan	75
5.3	Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib kepada kas negara yang dipungut dan dipaksakan kepada masyarakat, akan tetapi masyarakat tersebut tidak mendapatkan suatu balas jasa secara langsung. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mengatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Untuk itu, Pembangunan tidak dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari dalam negeri, sehingga pada sektor ini penerimaan dalam negeri sangat diperlukan. Pemerintah berupaya setiap tahunnya penerimaan dalam negeri terutama dari pajak terus meningkat. Pemungutan pajak didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf (a), bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007).

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pajak sebagai penerimaan Negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan Negara pun meningkat, sehingga Negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat mendistribusi pendapatan

dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan lebih kecil.

Jenis pajak yang diperhitungkan pada sisi penerimaan dalam APBN antara lain :

1. pajak penghasilan
2. pajak pertambahan nilai
3. bea masuk
4. bea cukai
5. bea ekspor
6. pajak bumi dan bangunan
7. pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak

Khususnya untuk pajak bumi dan bangunan sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah. Objek yang dikenakan pada pajak bumi dan bangunan ini adalah nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan pembagian sebagaimana diatur oleh undang-undang yaitu bagi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara , yaitu suatu jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dengan instansi operasionalnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kemudian menurut pasal 18 UU PBB, menyebutkan:

- a. Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbang 10% Untuk

Pemerintah Pusat dan 90% untuk Daerah (Pemerintahan tingkat II adalah kabupaten dan pemerintahan tingkat I adalah provinsi).

- b. Bagian penerimaan pemerintahan daerah sebagai mana yang dimaksud dalam Ayat (1), sebagian besar diberikan kepada pemerintah daerah tingkat II (pemerintahan kabupaten).
- c. Imbangan pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata :

1. Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi
2. Memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.

Jadi menurut penjelasan diatas dapat ditegaskan, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan Nasional yang dicanangkan Pemerintah, Karena diketahui sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu Daerah khususnya merupakan suatu subyek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga

memungkinkan sekali penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan dalam menggalang sumber pembiayaan pembangunan.

Pemerintah daerah Kabupaten Kampar khususnya di wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan bangunan, sehingga hasil pemungutan pajak tersebut dapat ditingkatkan semaksimal mungkin sesuai dengan target yang telah di tentukan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Heri Suneni (2010) tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sampel penelitian Heri Suneni adalah masyarakat atau Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kecamatan kerinci kanan kabupaten siak. Hasil penelitian Heri Suneni (2010) menunjukan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, Variabel penelitian Heri Suneni (2010) Variabel dependen Partisipasi Masyarakat. Variabel independen tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan kelompok umur. Sedangkan Variabel dependen dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat. Variabel independen tingkat pendidikan, penyuluhan mengenai pajak, tingkat pendapatan dan kelompok umur.

.Berdasarkan Paparan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURANGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Faktor Tingkat Pendidikan Dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.
2. Apakah Penyuluhan Mengenai Pajak Dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Apakah Tingkat Pendapatan Masyarakat Dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Apakah Kelompok Umur Dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Apakah Faktor Tingkat Pendidikan Dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar pajak Bumi Dan Banagunan.

2. Untuk Mengetahui Apakah Penyuluhan Mengenai pajak Dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Banagunan.
3. Untuk Mengetahui Apakah Tingkat Pendapatan Masyarakat dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Untuk Mengetahui Apakah Kelompok Umur Dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermamfaat untuk :

1. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dan pengetahuan serta melatih berfikir kritis, Obyektif dan ilmiah.

2. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Sehingga diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pihak yang terkait dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Bagi ilmu pengetahuan

Menambah khasanah ilmu pengetahuan administrasi pemerintahan,
Terutama dalam manajemen organisasi pemerintahan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1 : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, mamfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : Telaah Pustaka

Dalam bab ini berisikan telaah pustaka yang merupakan landasan teori yang menyangkut reprensi-reprensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, Pengertian Partisipasi Masyarakat, Partisipasi mayarakat Dalam Membayar Pajak, Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Menurut Pandangan islam, Pajak menurut pandangan islam,sejarah pemungutan pajak, sejarah pajak bumi dan bangunan, Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan, Dasar Hukum Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan, Kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisikan lokasi penelitian, Sumber data, Populasi dan Sampel, Teknik pengumpulan data, Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya, metode analisis data, pengujian kualitas data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesa.

BAB IV : Analisis Data

Dalam bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan bangunan di kecamatan Koto Kampar Hulu.

BAB VI : Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan asaran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi kedepannya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Ditinjau dari etimologis, kata partisipasi merupakan padanan dari kata *participatie* (bahasa belanda) atau *Participation* (bahasa inggris) yang berarti bagian atau ikut serta. Menurut Alex (2005 : 478) partisipasi berasal dari kata *participation* yang berarti partisipasi atau peran serta; keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan bersama-sama dengan orang lain atau mencapai tujuan tertentu.

Davis dan Nawstrom dalam Hendra (2007:16) partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan itu.

Seligman dan Edwin dalam Muhammad Al Amin (2003 : 9) menyatakan bahwa “ partisipasi adalah ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil bagian dan aktivitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan yang lebih besar ”. Dari pengertian diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi itu selalu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam kelompok masyarakat.

Sedangkan Wahydi Komorotomo (2005:136-138) mengatakan partisipasi Warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu :

1. Partisipasi dalam pemilihan (*elektora partispate*)
2. Partisipasi kelompok (*group participation*)
3. Kontak antara warga Negara dan Pemerintahan (*citizen-goperment contacting*)
4. Partisipasi warga Negara secara langsung di lingkungan Pemerintahan.

1.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak

Pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dan setiap pelaksanaan sebuah kebijakan. Adapun beberapa faktor-faktor lain yang sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dalam hal ini Pengabean (1998:43) menyatakan :

- a. Tingkat Pendidikan
- b. Tingkat Pendapatan
- c. Jarak dan tempat Tinggal
- d. Sikap
- e. Penyuluhan

Dalam hal penyuluhan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan membuat wajib pajak menjadi mengerti akan fungsi dan arti pajak itu sebenarnya agar pendapatan dari sektor pajak menjadi optimal maka perlu sekali diadakan penyuluhan dari aparat perpajakan.

Dibawah ini juga ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar pajak Yaitu :

a. Tingkat Pendidikan

Tuntutan akan pendidikan terus mengitari siklus kehidupan manusia, bahkan pendidikan menempati posisi teratas dalam kriteria pencapaian suatu kualitas dan produktifitas yang baik (Hari Suneni, 2010) Sehubungan dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak pemerintah di daerah khususnya pajak bumi dan bangunan, Maka konsekuensi tingkat pendidikan yang memadai harus dimiliki oleh masyarakat sebagai wajib pajak karena dengan pendidikan yang memadai akan turut menciptakan kelancaran dalam membayar pajak.

b. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperoleh rezki untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Pendapatan erat hubungannya dengan keadaan sosial ekonomi akan menentukan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari (Heri Suneni, 2010). dari pada itu tingkat pendapatan masyarakat juga mempengaruhi masyarakat dalam membayar pajak karena kalau tingkat pendapatan masyarakat tinggi maka tingkat sosial ekonomi masyarakat akan lebih baik dan dengan demikian masyarakat juga tidak akan merasa terlalu terbebani dengan membayar pajak karena pendapatan yang didapat sudah merasa lebih baik.

c. Penyuluhan Mengenai pajak

Penyuluhan perpajakan merupakan sistem penyampaian informasi dan bimbingan perpajakan berkesenambungan yang adalah ujung tombak dalam pelaksanaan Self Assesment System agar masyarakat tergugah dan sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Crenamaretha : 2009). Jadi penyuluhan merupakan suatu pokok yang harus dilaksanakan dalam mencapai suatu program.

d. Kelompok Umur

Identifikasi responden dapat juga ditinjau dari kelompok umur yang dimiliki oleh masyarakat karena konsepsi umur juga turut berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak karna dengan bertambahnya umur seseorang dapat mengubah pola pikir dan cara bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya (Heri Suneni, 2010).

Didalam ditelatur ilmu keuangan Negara faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana dari partisipasi masyarakat dengan membayar pajak ke kas Negara adalah:

1. Filsafah Negara
2. Kejelasan Undang-undang
3. Tingkat Pendidikan
4. Kualitas dan kuantitas Petugas Pajak setempat
5. Strategi yang diterapkan organisasi Pajak di Indonesia

Menurut W.J Delengan (Buhari, 2005 :38) terdapat teori-teori yang memberikan dasar pembenaran mengenai Wewenang Negara yang mengharuskan masyarakat untuk membayar pajak berdasarkan:

- a. Teori Asuransi
- b. Teori kepentingan
- c. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Pengorbanan)
- d. Teori Gaya Beli
- e. Teori Gaya pikul

Gaya pikul adalah kekuatan membayar uang Kepada Negara, Jadi untuk membayar pajak, Setelah dikurangi dengan minimum kehidupan (Basic needs). Basic needs ini seperti makanan, Pakaian, Perumahan dan biaya pendidikan W.J Delengan (Buhari, 2005 : 38).

Gaya pikul adalah sama dengan sebuah jembatan. Maksudnya adalah kekuatan masyarakat untuk menyerahkan uang kepada Negara baru ada jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia.

1.3 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak perairan) serta laut yang ada di Republik Indonesia Siti Kurnia Rahayu (2010 : 273). Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan Termasuk didalamnya adalah Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks : Hotel, pabrik dan emplasemennya.

1. Jalan Tol.
2. Kolom Renang
3. Pagar Mewah
4. Tempat Olah Raga
5. Galangan Kapal
6. Taman Mewah
7. Tempat Penampungan/Kalang Minyak, Air dan Gas Bumi dsb
8. Fasilitas lain yang memberi mamfaat

Jadi yang dimaksud pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan Undang- Undang-Undang Nomor 12 Tahu 1985 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak bumi dan bangunan.

Istilah menurut pasal 1 UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 adalah sebagai berikut :

- a. Bumi
- b. Bangunan
- c. Nilai Jual Ojek pajak
- d. Surat Pemberitahuan Objek pajak
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Pemerintah Daerah harus senantiasa berupaya meningkatkan pembiayaan bagi Daerahnya dengan menggali sumber-sumber pendapatan asli Daerah (PAD) yang terdapat di Daerah, Yang menurut pasal 157 UU No. 32 tahun 2004 terdiri dari :

Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut (PAD)

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Restribusi Daerah
- c. Hasil Paengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- d. Lain-lain PAD
- e. Dana Perimbangan
- f. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1.4 Pajak Menurut Pandangan islam

Adapun pajak dalam pandangan islam dapat kita lihat dalam Al-Quran surat Al-taubah ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا

يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ



Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai dia membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.(Qs. At-taubah : 29).

Yang dimaksud dengan jizyah ialah pajak perkepala yang dipungut oleh Pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan mereka.

Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undangnya wajib yang ditunaikan oleh kaum muslimin selama itu untuk kepentingan pembangunan berbagai bidang dan sektor kahidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan,

kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama

1.5 Sejarah Pemungutan Pajak

Manusia hidup bermasyarakat masing-masing membawa hak dan kewajiban. Akan tetapi dalam hal ini ada proses timbal balik antara individu dan masyarakat. Artinya ada hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat begitu juga sebaliknya, hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu. Selain itu adanya hubungan timbal balik antara masyarakat sebagai warga negara dalam memenuhi kewajiban pada negara, dan negara kepada masyarakatnya (Siti kurnia Rahayu. 2010).

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi negara. Disisi lain masyarakat sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsi yang ditunjukkan melalui keikutsertaannya dalam pembayaran negara.

Istilah dari pajak berasal dari jawa yaitu “ajeg” yang berarti pemungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian beransur-ansur mengalami perubahan, maka sebutan semula ajeg menjadi pa-ajeg. Pa-ajeg memiliki arti sebagai pemungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi.

1.6 Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan

Sejarah dari pajak bumi dan bangunan di Indonesia dimulai dari pengenalan pajak tanah (Land Rend) oleh pemerintah kolonial Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles pada abad 19 tepatnya tahun 1813 di pulau Jawa.

Raffles menentukan pajak ini pada individu bukan pada desa. Raffles membagi tanah atas kelompok-kelompok terhadap tanah kering dan tanah basah, pengenalan pajaknya adalah rata-rata produksi pertahun untuk sawah (tanah basah) dan tegalan (tanah kering).

1.7 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 ayat (1), yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau Bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, Perairan, Pedalaman serta laut wilayah Indonesia, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal, Tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

Disamping itu yang disebut dengan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam Kaitannya adalah orang atau badan yang :

- a. Mempunyai hak atas bumi; dan/atau

- b. Memperoleh mamfaat atas bumi;dan/atau
- c. Memiliki atau menguasai bangunan;dan/atau
- d. Memperoleh mamfaat atas bangunan

Dengan demikian dapat ditegaskan, Subjek pajak Bumi dan Bangunan adalah pemilik bumi dan bangunan dalam pengertian UU No.12 Tahun 1994, dan objeknya adalah bangunan (marihot Pahala Siahaan 2009 : 83-110)

1.8 Dasar Hukum Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 12 tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan,
Telah dirubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1994.
2. Keputusan menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 Tentang
Penyesuaian Besarnya NJOPTKP sebagian besar dasar Perhitungan
pajak Bumi dan Banagunan.
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 Tentang penetapan besarnya
Nilai jual kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.03/2002 Tentang
perubahan atas Keputusan menteri Keuangan No. 82/KMK.04/2000
Tentang pembagian hasil Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/1985 Tentang tata
cara Pendaftaran objek PBB.

6. Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/1985 Tentang tata cara Penangguhan PBB dan Penunjukan Pejabat yang berwenang Mengeluarkan Surat Paksa.
7. Keputusan Menteri No. 1007/KMK.04/1985 Tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Mdy kepala daerah tingkat II.
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998 tentang penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.9 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak dipungut berdasrkan tarif, Tarif Pajak merupakan suatu ukuran Standar dari suatu pemungutan pajak yang dapat mempergunakan perhitungan proporsi (persentase atau bersifat tetap), Sedangkan tarif pajak bumi dan bangunan yang dikenai atas objek pajak adalah sebesar 0.5% (lima per sepuluh persen).

Menurut Mardiasmo (2008 : 9) ada empat tarif Pajak antara lain yaitu :

1. Tarif propisional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya niali yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif

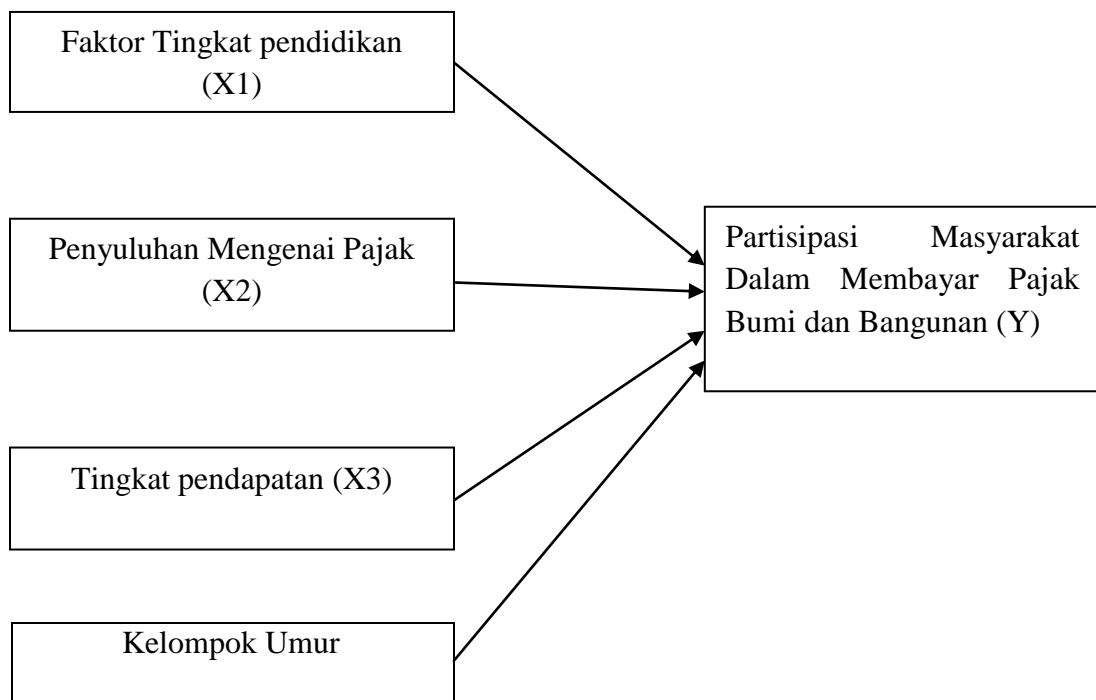
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.10 Kerangka Teoritis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori dan keterangan diatas, Maka dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut :

Gambar II.2

Model Penelitian



Variabe Independen (X)

Variabel Dependent (Y)

2.11 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, Dimana masalah penelitian sudah telah dinyatakan dalam kalimat pernyataan, Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, Belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Jadi hipotesis juga dapat menyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, Belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2005 :70).

Diduga Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan Koto Kamapar Hulu Kabupaten Kamapar Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikarenakan :

1. Faktor Tingkat Pendidikan

Tuntutan akan pendidikan terus mengitari siklus kehidupan manusia, bahkan pendidikan menempati posisi teratas dalam kriteria pencapaian suatu kualitas dan produktifitas yang baik (Hari Suneni, 2010) dengan judul : *Analisis Partisipasi masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.*

Sehubungan dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak pemerintah di daerah khususnya pajak bumi dan bangunan, Maka konsekuensi tingkat pendidikan yang memadai harus dimiliki oleh masyarakat sebagai wajib pajak karena dengan pendidikan yang memadai akan turut menciptakan kelancaran dalam membayar pajak. Maknanya seperangkat pengetahuan dan pemahaman yang berorientasi pada pendidikan formal supaya yang

menjadi kewajibannya dapat dipenuhi dengan baik termasuk pembayaran pajak yang telah ditetapkan tersebut. Dari kesimpulan diatas maka hipotesis yang didapat.

H1 : Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Penyuluhan Mengenai Pajak

Penyuluhan perpajakan merupakan sistem penyampaian informasi dan bimbingan perpajakan berkesenambungan yang adalah hujung tombak dalam pelaksanaan Self Assesment System agar masyarakat tergugah dan sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Crenamaretha : 2009). Jadi penyuluhan merupakan suatu pokok yang harus dilaksanakan dalam mencapai suatu program. Sesuai dari uraian di atas maka hipotesis yang di dapat yaitu :

H2 : penyuluhan dapat mempengaruhi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperoleh rezki untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Pendapatan erat hubungannya dengan keadaan sosial ekonomi akan menentukan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari (Heri Suneni, 2010). dari pada itu tingkat pendapatan masyarakat juga mempengaruhi masyarakat dalam membayar pajak karena kalau tingkat pendapatan masyarakat tinggi maka

tingkat sosial ekonomi masyarakat akan lebih baik dan dengan demikian masyarakat juga tidak akan merasa terlalu terbebani dengan membayar pajak karena pendapatan yang didapat sudah merasa lebih baik. Dengan kesimpulan diatas maka hipotesis yang didapat adalah :

H3 : tingkat pendapatan masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4. Kelompok Umur

Disamping tingkat pendapatan tersebut, Identifikasi responden dapat juga ditinjau dari kelompok umur yang dimiliki oleh masyarakat karena konsepsi umur juga turut berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak karna dengan bertambahnya umur seseorang dapat mengubah pola pikir dan cara bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya (Heri Suneni, 2010). dan hal ini logis sekali bahwa kematangan pola pikir dan dalam usia seseorang/masyarakat wajib pajak sangat mewarnai penguasaan dan pemahaman atas berbagai sistem dan prosedur yang berkaitan dengan penerimaan pajak dapat terpenuhi oleh wajib pajak sehingga mengoptimalkan penerimaan setiap tahunnya.

Dengan pengertian diatas maka kelompok umur juga dapat mempengaruhi masyarakat dalam membayar pajak. Jadi dengan uraian diatas maka hipotesis yang didapat :

H4 : Kelompok Umur dapat mempengaruhi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metodologi berasal dari kata Yunani yaitu *methodos* yang mempunyai makna alat untuk memahami suatu objek yang akan diteliti. Berkaitan dengan upaya ilmiah metodologi menyangkut cara kerja guna memahami objek yang akan menjadi sasaran dengan ilmu yang bersangkutan.

1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, yang terletak di jalan. Pelajar Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Adapun kecamatan Koto kampar Hulu terdiri atas enam desa.

1.2 Sumber Data

Dengan melihat dari judul yang peneliti buat maka peneliti menggunakan jenis data Primer :

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Responden dari penelitian ini yaitu masyarakat yang menjadi wajib pajak, dan kemudian diambil sebagai sampel. Dengan memberikan pertanyaan menyangkut dengan masalah yang diteliti. Dan yang biasanya bersifat Kuesioner dan pertanyaan seputar masalah yang akan di teliti pada lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Koto Kamapar Hulu.

1.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sigiyono (2006 : 90) menyatakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun yang menjadi Populasi dalam Penelitian ini adalah kepala keluarga yang bertempat tinggal di Kecamatan Koto kampar Hulu Kabupaten Kampar yang berjumlah 5057 orang. Kecamatan Koto Kampar Hulu terbagi dari 6 desa, dan dibawah ini terdapat jumlah penduduk yang ada dalam Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Tabel III.1

Daftar Jumlah Penduduk di Kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun 2012.

No	Nama Desa	Jumlah KK	LK	PR	Jumlah
1	Tanjung	1.385	2.927	2.771	5.705
2	Tabing	568	768	841	1.609
3	Pongkai	285	489	589	1.078
4	Gunung Malelo	1.283	2.481	2.236	4.717
5	Sibiruang	953	1.818	1.819	3.637
6	Bandur Picak	583	1.431	1.410	2.841
Total Jumlah		5.057	9.914	9.666	19.587

Sumber Data : Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2012.

2. Sample

Proses penarikan sampel dalam penelitian ini bertitik tolak pada jumlah populasi yang relatif cukup banyak, maka untuk memerlukan data yang dibutuhkan, diambil beberapa sampel dari setiap unsur populasi yang dirasa memungkinkan untuk mewakili setiap kelompok. Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik penentuan sampel diambil dari sebagian jumlah populasi yang dinilai dengan mewakili jumlah responden penelitian (Sugiyono, 2007:96).

Seadangkan Untuk Ukuran sampel dari populasi menggunakan rumus Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Dimana :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Taraf kesalahan yang ditoleransi dalam sampel (1%, 5%, 10%)

Adapun jumlah populasi atau jumlah Kepala Keluarga (KK) dari penelitian ini adalah sebesar 5057, maka dengan besarnya jumlah populasi tersebut dan demi menghemat biaya, tenaga dan waktu yang dilaksanakan maka penulis mengambil sampel dengan batas ketelitian sebesar 10% (0,1). Dengan menggunakan rumus Slovin dengan populasi 5057 maka didapatkan sampel sebesar 98, Dan dibawah ini cara perhitungan sampel menggunakan rumus Slovin :

$$n = \frac{5057}{1 + 5057 \times (0,1)^2}$$

$$n = \frac{5057}{1 + 5057 \times 0,01}$$

$$n = \frac{5057}{1 + 50.57}$$

$$n = \frac{5057}{5157}$$

$$n = 98$$

Kemudian teknik penarikan sampelnya digunakan secara Cluster Sampling, Yaitu suatu teknik sampling Daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti sangat luas, karena Desa-Desa di Kecamatan Koto Kampar Hulu berstrata (Tidak sama) maka pengambilan sampelnya menggunakan secara Proporsional (Sugiyono, 2005 : 93). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.2

Jumlah Populasi dan Sampel Di Kecamatan Koto kampar Hulu.

No	Nama Desa	Populasi	Sampel
1.	Tanjung	1.385	27
2.	Tabing	568	11
3.	Pongkai	285	6
4.	Gunung Malelo	1.283	25
5.	Sibiruang	953	18

6.	Bandar Picak	583	11
Jumlah		5057	98

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini merupakan *Cross section data*, yaitu data yang dikumpulkan dengan metode kuesioner (Mudrajat, 2003). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode sensus yaitu semua yang memenuhi syarat diambil sebagai data. Pengiriman kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada pihak terkait pada masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Pengiriman kuesioner tersebut dilakukan sendiri oleh peneliti dengan tujuan agar tingkat penegmbalian (*responserate*) kuesioner dapat lebih tinggi, sedangkan untuk pengambilan kuesioner yaitu dengan penetapan batas akhir tanggal pengambilan kuesioner.

1.5 Defenisi Variabel Operasional dan Pengukuran Variabelnya

Mudjarat, (2003:123), menyatakan bahwa variabel adalah suatu yang dapat membedakan nilai. Nilai dapat berada pada waktu yang berada untuk objek yang sama. Konsep dapat diubah menjadi variabel dengan cara memusatkan pada aspek tertentu dari variabel itu sendiri.

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan mengumpulkan atau menyebarkan kuesioner melalui responden yang akan diteliti, dan yang menjadi variabel dependen adalah Partisipasi Msarakat (Y) dan variabel

independennya adalah Tingkat pendidikan (X1), penyuluhan mengenai pajak(X2), Tingkat pendapatan (X3) Kelompok Umur (X4).

a. Variabel Dependen (Y)

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak.

partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dan setiap pelaksanaan sebuah kebijakan.

Untuk mengukur seberapa besar partisipasi masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan, maka penelitian ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (Sangat Setuju), 2 (Tidak Setuju), skala 3 (Netral), skala 4 (Setuju), skala 5 (Sangat Setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

b. Variabel Independen (X)

1. Tingkat Pendidikan (X1)

tingkat pendidikan yang memadai harus dimiliki oleh masyarakat sebagai wajib pajak karena dengan pendidikan yang memadai akan turut menciptakan kelancaran dalam membayar pajak

Untuk mengukur seberapa besar tingkat pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (Sangat setuju), skala 2 (Tidak Setuju), skala 3 ((Netral), skala 4 (Setuju),a skala 5 (Sangat Tidak Setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

2. Penyuluhan mengenai pajak (X2)

Penyuluhan perpajakan merupakan sistem penyampaian informasi dan bimbingan perpajakan berkesenambungan yang adalah hujung tombak dalam pelaksanaan Self Assesment System agar masyarakat tergugah dan sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya

Untuk mengukur seberapa besar penyuluhan mengenai pajak mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka pengukur variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (Sangat setuju), skala 2 (Tidak Setuju), skala 3 ((Netral), skala 4 (Setuju),a skala 5 (Sangat Tidak Setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

3. Tingkat pendapatan (X3)

Tingkat pendapatan adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperoleh rezki untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Pendapatan erat hubungannya dengan keadaan sosial ekonomi akan menentukan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mengukur seberapa besar tingkat pendapatan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka pengukur variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (Sangat setuju), skala 2 (Tidak Setuju), skala 3 ((Netral), skala 4 (Setuju),a skala 5 (Sangat Tidak Setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

4. Kelompok Umur (X4)

Dengan bertambahnya umur seseorang maka dapat mengubah pola pikir dan cara bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Untuk mengukur seberapa besar kelompok umur mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka pengukur variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (Sangat setuju), skala 2 (Tidak Setuju), skala 3 ((Netral), skala 4 (Setuju),a skala 5 (Sangat Tidak Setuju).

Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

1.6 Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Adapun alasan penggunaan regresi linier berganda adalah karena penelitian ini akan membahas hubungan empat variabel independent yaitu : tingkat pendidikan penyuluhan, mengenai pajak, tingkat pendapatan dan Kelompok umur. dan satu variabel dependen yaitu partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Untuk menganalisis jawaban kuesioner dari responden, diberi nilai dengan menggunakan ketentuan *skala Likert* (Sugiyono, 2005) sebagai berikut:

A = Bobot Nilai = 5 (Sangat Setuju)

B = Bobot Nilai = 4 (Setuju)

C = Bobot Nilai = 3 (Netral)

D = Bobot Nilai = 2 (Tidak Setuju)

E = Bobot Nilai = 1 (Sangat Tidak Setuju)

Instrument penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk *checklist* atau *cross* pada pilihan yang telah diberikan.

Keuntungan skala Likert adalah:

1. Mudah dibuat dan diterapkan.
2. Terdapat kebebasan dalam memasukkan pertanyaan-pertanyaan, asalkan masih sesuai dengan konteks permasalahan.
3. Jawaban suatu item dapat berupa alternatif, sehingga informasi mengenai item tersebut diperjelas.
4. Reliabilitas pengukuran bisa diperoleh dengan jumlah item tersebut diperjelas.

1.7 Pengujian Kualitas Data

Dalam penelitian ini, jawaban dari responden pada kuesioner merupakan ukuran yang akan diuji. Agar data yang didapatkan dari para responden dapat menggambarkan secara tepat konsep yang diukur, maka dilakukan tiga macam tes yaitu uji normalitas, uji validitas, dan uji realibilitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini untuk menguji normalitas data menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov, kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variabel menghasilkan nilai K-S-Z dengan $P > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing data pada variabel yang diteliti terdistribusi secara normal.

2. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk menentukan taraf sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (Indriantoro dan Supomo, 2002). Validitas menunjukkan tingkat kemampuan suatu instrument untuk mengungkapkan sesuatu menjadi sasaran pokok pengukuran yang dilakukan dengan instrument tersebut. Suatu instrument dinyatakan valid jika instrumen tersebut mampu mengukur apa saja yang hendak diukurnya.

Data yang valid tergantung dari:

1. Ketepatan penelitian dalam memilih responden sebagai sampel penelitian
2. Kepatuhan para responden dalam mengikuti petunjuk yang ditetapkan dalam kuesioner
3. Keadaan para responden pada saat mengisi kuesioner

Uji validitas untuk penelitian ini menggunakan korelasi Pearson. Alasan digunakan teknik ini karena statistik ini sudah sangat luas dan interpretasinya tidak terlalu rumit, selain itu model tersebut dapat digunakan untuk

mengkorelasikan skor per item dengan skor totalnya. Cara penentuan validitas data adalah dengan membandingkan jawaban pertanyaan dan total jawaban pada setiap variabel penelitian saling dikorelasikan. Hasil dari korelasi tersebut dibandingkan dengan r tabel pada tingkat signifikan 0,05. Apabila r hitung lebih besar dari pada r tabel, maka instrument tersebut adalah valid, sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari pada r tabel maka instrument tersebut tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Istilah reliabilitas disamakan dengan konsisten, stabil atau dapat dipercaya, yang pada prinsipnya menunjukkan sejauh mana pengukuran itu dapat memperoleh hasil yang relatif tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama. Meskipun demikian reliabilitas alat ukur tidak harus selalu diuji dengan melakukan tes ulang, karena berbagai teknik telah memungkinkan pengujian reliabilitas yang tidak memerlukan lebih dari satu kali pengukuran.

Untuk melihat reliabilitas dari instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, akan dihitung *Cronbach Alpha* masing-masing instrumen. Variabel tersebut akan dikatakan reliabel jika *Cronbach Alpha* memiliki nilai lebih besar dari 0,6. Sebaliknya jika koefisien alpha instrumen lebih rendah dari 0,6 maka instrumen tersebut tidak reliabel untuk digunakan dalam penelitian ini (Indrianti dan Supomo, 2002:179).

3.8 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikoliniertas

Menurut Gujarati & Kutner Multikoliniertas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel bebas (X) yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linier. Jelas bahwa multikoliniertas adalah suatu kondisi yang menyalahi asumsi regresi linier. Tentu saja, multikoliniertas tidak mungkin terjadi apabila variabel bebas (X) yang diikutsertakan hanya satu.

Ciri-ciri yang sering ditemui apabila model regresi linier kita mengalami multikoliniertas adalah :

1. Terjadi perubahan yang berarti koefisien model regresi (misal nilainya menjadi lebih besar atau kecil) apabila dilakukan penambahan atau pengeluan sebuah variabel bebas dari model regresi.
2. Diperoleh nilai R-square yang besar, sedangkan koefisien regresi tidak signifikan pada uji parsial.
3. Tanda (+ atau -) pada koefisien model regresi berlawanan dengan yang disebutkan dalam teori (atau logika). Misal, pada teori (atau logika) seharusnya b_1 bertanda (+), namun yang diperoleh justru bertanda (-).
4. Nilai standar error untuk koefisien regresi menjadi lebih besar dari yang sebenarnya (overestimated).

Untuk mendeteksi apakah model regresi kita mengalami multikoliniertas, dapat dipaksa menggunakan VIF. VIF merupakan singkatan dari variance Inflation Factor. Nilai $VIF > 10$ berarti telah terjadi multikolinieritas yang serius di dalam model regresi kita.

2. Uji Heterokedestistik (Uji Park)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji park untuk melakukan uji Heterokedestistik. Park mengemukakan metode bahwa variance (S^2) merupakan fungsi dari variabel-variabel independen yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$\sigma^2_i = \alpha X_i \beta$$

Persamaan ini dijadikan linier dalam bentuk persamaan logaritma sehingga menjadi :

$$\ln U^2_i = \alpha + \beta \ln X_i + v_i$$

Karena S^2_i umumnya tidak diketahui maka dapat ditaksir dengan menggunakan residual U_i sebagai produksi, sehingga persamaan sebagai berikut :

$$\ln U^2_i = \alpha + \beta \ln X_i + v_i$$

Tingkat signifikan yang digunakan adalah α 0.05 yang lazim digunakan dalam penelitian pada ilmu-ilmu sosial.

3.9 Pengujian Hipotesa

Dalam penelitian ini pengujian hipotesisnya dengan menggunakan regresi linear berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, X_3 \dots X_n$) dengan variabel dependen (Y).

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_n$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen

X_1, X_2, \dots, X_n = Variabel Independen

a = Konstanta

1. Koefisien Regresi Uji T

Menunjukkan berapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji dilakukan secara terpisah-pisah untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Uji T dilakukan untuk membandingkan t hitung dengan t tabel pada tingkat signifikan 5% (0.05). jika t dihitung $> t$ tabel maka variabel bebas dengan variabel berikutnya.

Kriteria pengujian H_0 diterima apabila t dihitung $< t$ tabel. H_a diterima apabila t hitung $> t$ tabel. Kategori yang digunakan berdasarkan skala likers, dimana responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan nilai jawaban berikut ini :

- a. Alternatif SS (Sangat Setuju 5)
- b. Alternatif S (Setuju 4)
- c. Alternatif N (Netral 3)
- d. Alternatif KS (Kurang Setuju 2)
- e. Alternatif STS (Sangat Setuju 1)

2. Uji Kefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ($x_1 \dots x_2 \dots x_n$) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). (Dwi Priyanto, 2009 : 81).

Dalam Uji F kesimpulan yang didapat adalah melihat signifikan (α) 5% dengan ketentuan :

$F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak : independent tidak berpengaruh secara simultan kepada dependen.

$F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima : independent berpengaruh secara simultan kepada dependen.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dalam variable independen mampu menjelaskan bersama-sama variable dependen atau seberapa baik model regresi yang telah dibuat tersebut cocok dengan data. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variable independen dalam menjelaskan variable dependennya. Uji ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Keterangan :

R^2 : Koefisien Diterminasi

ESS : *expend sun square* (jumlah kuadrat yang dijelaskan)

TSS : *Total sun square* (jumlah total kuadrat)

Uji koefisian Diterminasi R^2 dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui persentase sambungan pengaruh variabel independen (X)

secara serentak terhadap variabel dependend (Y) persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

Semakin besar koefisian determinasi maka semakin baik variabel dependen dalam menjelaskan variabel dependen (Imam Ghozali,2006).

Nilai R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa baik suatu model yang diterapkan dapat menjelaskan variabel dependennya. Apabila nilai R^2 bernilai 0 maka dapat ditentukan bahwa tidak ada variasi dependent yang dapat dijelaskan oleh hubungan tersebut, namun jika R^2 bernilai 1 maka dapat dikatakan bahwa semua variasi variabel dependen dapat dijelaskan. Dengan demikian R^2 bernilai antara 0 sampai 1.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan bab ini meliputi hasil penelitian secara empiris antara tingkat pendidikan, penyuluhan mengenai pajak, tingkat pendapatan dan kelompok umur terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini meliputi gambaran umum responden, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda.

1.1 Kuesioner dan Demografi Responden

Populasi pada penelitian ini adalah Kepala Keluarga (KK) yang bertempat tinggal di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. dan sampel yaitu Kepala Keluarga atau masyarakat wajib pajak. Dari hasil penyebaran kuesioner, total yang disebar oleh peneliti yaitu sebanyak 98 responden. Dan kuesioner yang terkumpul dan dapat diolah kembali yaitu sebanyak 98 responden.

Dapat dijelaskan bahwa peneliti menyebarkan 98 kuesioner atau 100%. Kuesioner yang terkumpul kembali sebanyak 98 kuesioner atau 100%. Jadi, total kuesioner yang dapat diolah dari jumlah keseluruhan kuesioner yang disebar adalah 98 kuesioner atau 100%.

Tabel IV.1**Demografi Responden**

Keterangan	Frekuensi 98	Persentase 100%
Pekerjaan		
a. PNS	13	13,26%
b. Pedagang	28	28,57%
c. Petani	42	42,86%
d. Peternak	15	15,31%
Jenis kelamin		
a. Pria	61	62,24%
b. Wanita	37	37,76%
Pendidikan		
a. SD	33	33,67%
b. SMP	28	28,57%
c. SMA	22	22,45%
d. S1	15	15,31%
Umur		
a. Antara 20 sampai 30 tahun	21	21,43%
b. Antara 31 sampai 40 tahun	34	34,69%
c. Antara 41 sampai 50 tahun	43	43,88%

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel IV.1 di atas, dapat dilihat bahwa persentase data demografi responden berdasarkan pekerjaan dalam penelitian ini adalah PNS 13 responden atau 13,26% Pedagang 28 responden atau 28,57% Petani 42 responden atau 42,86% Peternak 15 responden 15,31%. Demografi responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh pria yaitu sebanyak 61 responden atau 62,24% dan wanita sebesar 37 responden atau 37,76%. Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini adalah SD/ sederajat, 33 responden atau 33,67% SMP/ sederajat, 28 responden atau 28,57% SMA/ sederajat, 22 responden atau 22,45% S1/ sederajat, 15 responden atau 15,31%. Umur responden dalam penelitian ini adalah 21 responden atau 21,43% mempunyai umur antara 20 sampai 30 tahun, 34 responden atau 34,69% mempunyai umur antara 31 sampai 40 tahun, dan 43 responden atau 43,88% yang mempunyai umur antara 41 sampai 50 tahun.

1.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrument dalam kuesioner harus diuji kualitas datanya atau syarat yang penting yang berlaku dalam kuesioner seperti: keharusan suatu kuesioner untuk valid dan reliabel. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut valid atau reliabel yang akan diukur, sehingga penelitian ini bisa mendukung hipotesis.

Dalam pengujian yang peneliti lakukan untuk mengetahui kualitas data, layak atau tidaknya suatu data untuk diangkat, maka peneliti menganalisis data dengan cara

mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pernyataan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Dan pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson) dan dilakukan dengan *one shot method*, yaitu metode yang dilakukan sekali pengukuran untuk menguji validitas dari instrumen penelitian (Ghozali, 2002:25). Kuesioner dapat dikatakan valid jika nilai *pearson Korelation* lebih besar dari nilai r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 98, maka r tabelnya adalah 0,197.

Sedangkan penulis melakukan pengukuran reliabilitas dengan menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* guna menguji kelayakan terhadap konsistensi seluruh skala yang digunakan. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha* menggunakan SPSS. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* >0,60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, (2006). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *one shot* atau diukur sekali saja.

Tabel IV.2

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Pendidikan

Item Variabel	Validitas		Reliabilitas	
	<i>pearson Correlation</i>	<i>Kesimpulan</i>	<i>Conbach Alpha</i>	<i>Kesimpulan</i>
Tingkat Pendidikan			0,632	<i>Reliabel</i>
T1	0,422	Valid		
T2	0,233	Valid		
T3	0,619	Valid		
T4	0,221	Valid		
T5	0,348	Valid		
T6	0,599	Valid		
T7	0,516	Valid		

Sumber : Data Olahan

Dari tabel IV.2 dapat dijelaskan bahwa Tingkat Pendidikan diukur dengan 7 item pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa item 1,2,3,4,5,6,7 memiliki nilai lebih besar dari 0,197 sehingga valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pada variable tingkat pendidikan valid. Setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai koefisien alpha adalah 0,632 yang berarti variabel tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60.

Tabel IV.3

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Penyuluhan Mengenai Pajak

Item Variabel	Validitas		Reliabilitas	
	<i>pearson Correlation</i>	<i>Kesimpulan</i>	<i>Conbach Alpha</i>	<i>Kesimpulan</i>
Penyuluhan Mengenai Pajak			0,704	<i>Reliabel</i>
P1	0,320	Valid		
P2	0,300	Valid		
P3	0,595	Valid		
P4	0,578	Valid		
P5	0,444	Valid		
P6	0,808	Valid		
P7	0,265	Valid		

Sumber : Data Olahan

Dari tabel IV.3 dapat dijelaskan bahwa Penyuluhan Mengenai Pajak diukur dengan 7 item pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa item 1,2,3,4,5,6,7 memiliki nilai lebih besar dari 0,197 sehingga valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel penyuluhan mengenai pajak valid. Setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai koefisien alpha adalah 0,704 yang berarti variabel tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60.

Tabel IV.4

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat pendapatan

Item Variabel	Validitas		Reliabilitas	
	<i>pearson Correlation</i>	<i>Kesimpulan</i>	<i>Conbach Alpha</i>	<i>Kesimpulan</i>
Tingkat pendapatan			0,620	<i>Reliabel</i>
TP1	0,521	Valid		
TP2	0,416	Valid		
TP3	0,422	Valid		
TP4	0,543	Valid		
TP5	0,428	Valid		
TP6	0,269	Valid		
TP7	0,300	Valid		

Sumber :Data Olahan

Dari tabel IV.4 dapat dijelaskan bahwa tingkat pendapatan diukur dengan 7 item pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa item 1,2,3,4,5,6,7 memiliki nilai lebih besar dari 0,197 sehingga valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel tingkat pendapatan valid. Setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai koefisien alpha adalah 0,620 yang berarti variabel tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60.

Tabel IV.5

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kelompok Umur

Item Variabel	Validitas		Reliabilitas	
	<i>pearson Correlation</i>	<i>Kesimpulan</i>	<i>Conbach Alpha</i>	<i>Kesimpulan</i>
Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar PBB			0,609	Reliabel
TTP1	0,365	Valid		
TTP2	0,416	Valid		
TTP3	0,359	Valid		
TTP4	0,314	Valid		
TTP5	0,588	Valid		
TTP6	0,513	Valid		
TTP7	0,310	Valid		

Sumber : Data Olahan

Dari tabel IV.5 dapat dijelaskan bahwa kelompok umur diukur dengan 7 item pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa item 1,2,3,4,5,6,7, memiliki nilai lebih besar dari 0,197 sehingga valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel kelompok umur valid. Setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai koefisien alpha adalah 0,609 yang berarti variabel tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60.

Tabel IV.6

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Item Variabel	Validitas		Reliabilitas	
	<i>pearson Correlation</i>	<i>Kesimpulan</i>	<i>Conbach Alpha</i>	<i>Kesimpulan</i>
Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar PBB			0,670	<i>Reliabel</i>
TTPP1	0,363	Valid		
TTPP2	0,422	Valid		
TTPP3	0,601	Valid		
TTPP4	0,293	Valid		
TTPP5	0,500	Valid		
TTPP6	0,399	Valid		
TTPP7	0,610	Valid		
TTPP8	0,473	Valid		

Sumber : Data Olahan

Dari tabel IV.6 dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar PBB diukur dengan 8 item pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa item 1,2,3,4,5,6,7,8 memiliki nilai lebih besar dari 0,197 sehingga valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel partisipasi masyarakat valid. Setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai koefisien alpha adalah 0,670 yang berarti variabel tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha di atas 0,60.

1.3 Analisis Data Penelitian

1.3.1 Hasil Statistik Deskriptif Variable

Analisis yang dilakukan adalah analisis terhadap 98 responden yang telah memenuhi syarat pengelolaan data selanjutnya. Hasil statistik deskriptif variable penelitian dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.7

Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
TOTALY	32.60	3.079	98
TOTALX1	27.44	2.512	98
TOTALX2	22.02	2.769	98
TOTALX3	27.11	2.415	98
TOTALX4	28.14	2.424	98

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel IV.7 Dapat dilihat bahwa patrisipasi masyarakat dalam membayar PBB mempunyai nilai rata-rata jawaban responden adalah 32,60 dengan standar deviasi 3.079. Dengan demikian masyarakat dalam instansi ini turut berpatisipasi dalam membayar PBB . Tingkat Pendidikan mempunyai nilai rata-rata jawaban responden adalah 27,44 dengan standar deviasi 2.512.Hal ini menunjukan

bahwa instansi Tingkat Pendidikan ini tinggi. Dan penyuluhan mengenai pajak mempunyai nilai rata-rata jawaban responden adalah 22.02 dengan standar deviasi 2.769. tingkat pendapatan mempunyai nilai rata-rata jawaban responden adalah 27.11 dengan standar deviasi 2.415 Maka responden. Dan Kelompok umur mempunyai nilai rata-rata jawaban responden adalah 28.14 dengan standar deviasi 2.424 Maka responden.

1.3.2 Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas adalah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal. Pada penelitian ini untuk menguji normalitas data juga menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji normalitas disajikan sebagai berikut terlihat pada tabel IV.8 berikut :

Tabel IV.8
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Tes

		TOTALX1	TOTALX2	TOTALX3	TOTALX4	TOTALY
N		98	98	98	98	98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	27.44	22.02	27.11	28.14	32.60
	Std. Deviation	2.512	2.769	2.415	2.424	3.079
Most Extreme Differences	Absolute	.135	.145	.114	.119	.104
	Positive	.095	.145	.105	.089	.056
	Negative	-.135	-.130	-.114	-.119	-.104
Kolmogorov-Smirnov Z		1.334	1.433	1.130	1.182	1.026
Asymp. Sig. (2-tailed)		.057	.033	.156	.123	.243

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

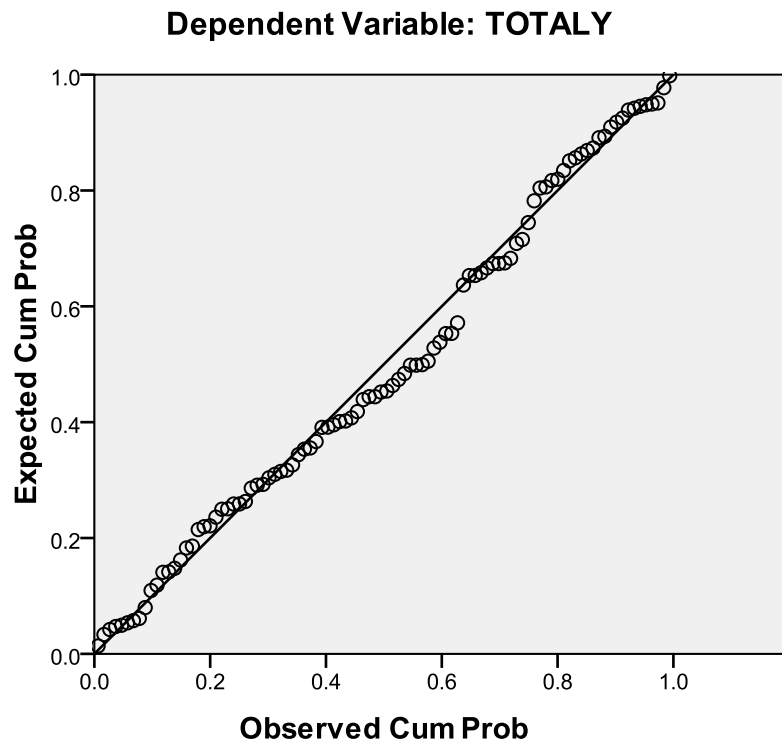
Tabel IV.8 menunjukkan hasil K-S-Z untuk variabel tingkat pendidikan adalah sebesar 1,334 signifikansi sebesar 0,057. Nilai K-S-Z untuk variabel penyuluhan mengenai pajak adalah sebesar 1,443 signifikansi sebesar 0,033. Nilai K-S-Z untuk variabel tingkat pendapatan adalah sebesar 1,130 signifikansi sebesar 0,156. Nilai K-S-Z untuk variabel kelompok umur adalah sebesar 1,182 signifikansi 0,123 sebesar. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak adalah sebesar 1,026 signifikansi 0,243 sebesar. Semua nilai K-S-Z tersebut > dari 5% atau 0,05, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel dalam penelitian ini secara statistik telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

Deteksi normalitas juga dapat dilihat menggunakan grafik normal P-P Plot of Regression Standarized Residual sebagai berikut :

Gambar IV.1

Diagram P-P Plot Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data Olahan

Pada gambar IV.1 terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal

atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normal dapat melihat grafik normal P-P Plot of Regression Standardized Residual. Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik (Santoso, 2002).

1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dengan menggunakan VIF paling banyak dilakukan dalam penelitian di Indonesia. Asumsi Multikolinearitas terpenuhi jika nilai VIF pada Output SPSS dibawah 10. Karena $VIF = 1$ Maka asumsi bebas Multikolinearitas juga dapat ditentukan jika tolerance diatas 0,5 . Hasil uji multikolinearitas seperti pada tabel IV.9 berikut :

Tabel IV.9

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Asumsi	Keterangan
Tingkat pendidikan	0,902	1,109	VIF/Tolerance	Bebas
Penyuluhan Mengenai Pajak	0,853	1,173	VIF/Tolerance	Bebas
Tingkat Pendapatan	0,782	1,279	VIF/Tolerance	Bebas
Kelompok Umur	0,825	1,213	VIF/Tolerance	Bebas

Sumber : Data Olahan

Dari tabel IV.9 diatas, dapat dilihat bahwa variabel tingkat pendidikan mempunyai nilai VIF sebesar 1,109. Dikarenakan VIF di atas angka 1 dan memiliki nilai *tolerance* diatas 0,5, sehingga bisa disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas dan layak digunakan. Dan variabel penyuluhan mengenai pajak nilai VIF sebesar 1,173 Dikarenakan VIF di atas angka 1 dan memiliki nilai *tolerance* diatas 0,5, sehingga bisa disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas dan layak digunakan. variabel tingkat pendapatan nilai VIF sebesar 1,279 Dikarenakan VIF di atas angka 1 dan memiliki nilai *tolerance* diatas 0,5, sehingga bisa disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas dan layak digunakan. variabel kelompok umur nilai VIF sebesar 1,213 Dikarenakan VIF di atas angka 1 dan memiliki nilai *tolerance* diatas 0,5, sehingga bisa disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas dan layak digunakan.

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Metode yang digunakan dalam mendeteksi heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat grafik plot prediksi variabel dependen, yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dengan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X

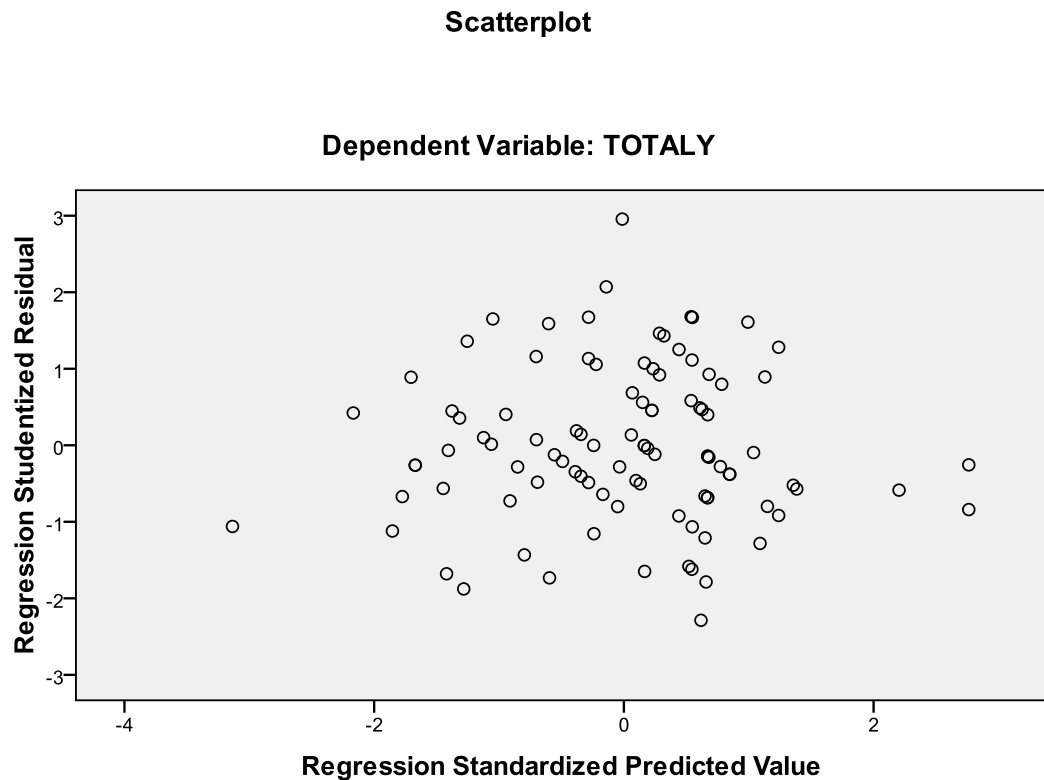
adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y , maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji plot dapat disimpulkan sebagai berikut :

Gambar IV.2

Diagram Scatterplot



Sumber : Data Olahan

Dari gambar IV.2 diatas, terlihat titik menyebar secara acak atau tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas dan tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas yang berarti model regresi layak untuk memprediksikan variabel dependen berdasarkan masukan variabel independen.

Dari hasil uji asumsi klasik terhadap variabel-variabel independen diatas, dapat disimpulkan bahwa data-data diatas lolos dari uji asumsi klasik dan uji kualitas data dan data diatas bisa dipakai pada proses selanjutnya, yaitu pada pengujian hipotesis.

4.5 Analisis Hasil Regresi

Tabel IV.10
Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.562	3.275		-.477	.634	-8.066	4.941					
TOTAL X1	-.001	.080	-.001	-.018	.986	-.160	.157	.068	-.002	-.001	.902	1.109
TOTAL X2	.150	.074	.135	2.022	.046	.003	.298	.236	.205	.125	.853	1.173
TOTAL X3	.259	.089	.203	2.915	.004	.083	.436	.515	.289	.180	.782	1.279
TOTAL X4	.848	.086	.668	9.830	.000	.677	1.019	.763	.714	.606	.825	1.213

a. Dependent Variable: TOTALLY

Sumber : Data Olahan

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y' = -1.562 + (-0,001)X_1 + (0,150)X_2 + (0.259)X_3 + (0,848)X_4 + e$$

Keterangan:

Y' = Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar PBB

a = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Tingkat Pendidikan

X_2 = Penyuluhan Mengenai Pajak

X_3 = Tingkat Pendapatan

X_4 = Kelompok Umur

e = Error

Persamaan regresi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar -1,562, Artinya jika Variabel tingkat Pendidikan (X_1), Penyuluhan Mengenai Pajak (X_2), Tingkat Pendapatan (X_3) dan Kelompok

Umur (X_4) sebesar nol, maka partisipasi masyarakat membayar PBB (Y) nilainya adalah -1,562.

- b. Koefisien regresi variabel tingkat pendidikan (X_1) sebesar -0,001 Artinya: jika variable lain tetap dan tingkat pendidikan menurun maka tingkat partisipasi masyarakat membayar PBB akan menurun sebesar -0,001 poin. Koefisien bernilai negatif artinya tidak terjadi hubungan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat membayar PBB.
- c. Koefisien regresi variabel penyuluhan mengenai pajak (X_2) sebesar 0,150 Artinya: jika variable lain tetap dan mengenai pajak (X_2) meningkat sebesar 0,150 poin. Koefisien bernilai berpositif artinya terjadi hubungan positif antara partisipasi masyarakat membayar PBB.
- d. Koefisien regresi variabel tingkat pendapatan (X_3) sebesar 0,259 Artinya: jika variable lain tetap dan tingkat pendapat (X_3) meningkat sebesar 0,259 poin. Koefisien bernilai berpositif artinya terjadi hubungan positif antara partisipasi masyarakat membayar PBB.
- e. Koefisien regresi variabel kelompok umur (X_4) sebesar 0,848 Artinya: jika variable lain tetap dan kelompok umur (X_4) meningkat sebesar 0,848 poin. Koefisien bernilai berpositif artinya terjadi hubungan positif antara partisipasi masyarakat membayar PBB.

4.5.1 Uji Persial (Uji T)

Uji t digunakan untuk menguji dan membandingkan rata nilai suatu sampel dengan nilai lainnya. Uji dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel

independen secara persial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat yang ditentukan dengan tingkat signifikan sebesar 0,5% dengan degree of freedom (df) $n-k$ membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} maka H_0 di tolak dan H_a diterima.

Pembuktiaan hipotesis secara persial dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Sehingga dapat diketahui variabel bebas mana yang dominan pengaruhnya terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel IV.11 berikut ini :

Tabel IV.11

Hasil Regresi Secara Persial

Model	T	Sig	Hipotesis	Keputusan
1 (Constant)	-0,447	,634		
Tingkat Pendidikan	-0,018	,986	H1	Ditolak
Penyuluhan Mengenai pajak	2,022	,046	H2	Diterima
Tingkat Pendapatan	2,915	,004	H3	Diterima
Kelompok Umur	9,830	,000	H4	Diterima

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel IV.11. diatas maka dilakukan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} pada signifikan 5% dengan asumsi sebagai berikut :

1. Jika signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima

2. Jika signikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak

Berdasarkan asumsi diatas hasil pegujian hipotesis secara persial dapat disimpulkan bahwa hipotesis untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

H₁ : tingkat pendidikan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB

Dari tabel IV.11. diatas, dapat diketahui nilai t hitungnya adalah sebesar -0,018. Oleh karena nilai t hitung $< t$ tabel ($-0.018 < 1,986$), maka H₁ ditolak, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Untuk variabel tingkat pendidikan (X1) memiliki nilai signifikan sebesar 0,986(besar dari $\alpha=5\%$), maka hasil ini juga tidak mendukung hipotesis pertama (H₁) yang diajukan, karenanya hasil pengujian ini menunjukkan bahwa partisipasi tingkat pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.

Hasil ini berbeda dengan penelitian Heri suneni (2010) yang menyatakan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB . Hal ini disebabkan mungkin tingkat pendidikan didaerah tesebut lebih baik dari tingkat pendidikan yang sekarang diteliti, maka tingkat pendidikan di kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar in masihi rendah.

H₂ : penyuluhan mengenai pajak mempengaruhi masyarakat dalam membayar PBB.

Dari tabel IV.11 diatas, dapat diketahui nilai t hitungnya adalah sebesar 2,022. Oleh karena nilai t hitung $>$ t tabel ($2,022 > 1,986$), maka H_2 diterima, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara penyuluhan mengenai pajak terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Untuk variabel penyuluhan mengenai pajak (X_2) memiliki nilai signifikan sebesar 0,046(besar dari $\alpha=5\%$), maka hasil ini mendukung hipotesis kedua (H_2) yang diajukan, karena hasil pengujian ini menunjukkan bahwa penyuluhan mengenai pajak berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.

Hal ini dikarenakan bahwa penyuluhan mengenai pajak di kecamatan Koto Kampar Hulu sudah pernah diadakan oleh aparat perpajakan. oleh karna itu, masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu ini paham tentang fungsi penting pajak. Diterimanya hipotesis kedua ini menunjukan bahwa semakin sering aparat pajak mengadakan penyuluhan tentang pajak, maka pemahaman masyarakat tentang pajak juga akan lebih baik.

H_3 : Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.

Dari tabel IV.11 diatas, dapat diketahui nilai t hitungnya adalah sebesar 2,915. Oleh karena nilai t hitung $>$ t tabel ($2,915 > 1,986$), maka H_3 diterima, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara tingkat pendapatan dengan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Untuk variabel tingkat pendapatan (X_3) memiliki

nilai signifikan sebesar 0,004 (kecil dari $\alpha=5\%$), maka hasil ini juga mendukung hipotesis ketiga (H_3) yang diajukan, karenanya hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.

Hasil ini didukung dari penelitian Heri Suneni (2010) yang menyatakan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini mungkin disebabkan karena instansi ini sama-sama berpendapatan yang memadai atau tinggi. Dengan tingkat pendapat masyarakat tersebut tinggi, maka partisipasi masyarakat dalam membayar pajak juga lebih baik. Diterimanya hipotesis ketiga ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pendapatan masyarakat maka partisipasi masyarakat dalam membayar pajak juga semakin baik.

H_4 : kelompok umur berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.

Dari tabel IV.11 diatas, dapat diketahui nilai t hitungnya adalah sebesar 9,830. Oleh karena nilai t hitung > t tabel ($9,830 > 1,986$), maka H_4 diterima, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara kelompok umur dengan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Untuk variabel kelompok umur (X_4) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 (kecil dari $\alpha=5\%$), maka hasil ini juga mendukung hipotesis ketiga (H_4) yang diajukan, karenanya hasil pengujian ini menunjukkan bahwa

kelompok umur berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.

Hasil ini didukung dari penelitian Heri Suneni (2010) yang menyatakan kelompok umur berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini logis sekali bahwa kematangan pola pikir dalam usia seseorang masyarakat wajib pajak sangat mewarnai penguasaan dan pemahaman atas berbagai sistem dan prosedur yang berkaitan dengan penerimaan PBB, Diterimanya hipotesis keempat ini, karna dengan pemahaman itulah kewajiban pembayaran pajak terpenuhi oleh wajib pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan setiap tahunnya.

4.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Untuk pengujian variabel independen secara bersamaan digunakan statistik Uji F (F-Test) dilakukan untuk melakukan apakah model pengujian hipotesis yang dilakukan tepat. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisis Uji F dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dan juga melihat signifikansi lebih kecil dari 5%.

Tabel IV.12

Hasil Regresi (Uji F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	594.095	4	148.524	42.450	.000 ^a
	Residual	325.385	93	3.499		
	Total	919.480	97			

a. Predictors: (Constant), TOTALX4, TOTALX1, TOTALX2, TOTALX3

b. Dependent Variable: TOTALLY

Sumber: Data Olahan

Dari tabel IV.12 diatas, pada model satu untuk semua variabel independen diperoleh angka signifikan (*p value*) sebesar 0,000 yang berarti bahwa tingkat pendidikan, penyuluhan mengenai pajak, tingkat pendapatan dan kelompok umur sama-sama berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan tingkat kesalahan 0,00%. Karena angka ini lebih kecil dari $\alpha=5\%$, maka dapat dikatakan bahwa model ini layak digunakan (signifikan).

Untuk melakukan uji F perlu dibandingkan antara F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis kelima ini bisa diterima. Dari hasil perhitungan diketahui hasilnya sebagai berikut:

F hitungnya adalah sebesar 42,450

F tabel adalah sebesar 2,470

F hitung > F tabel ($42,450 > 2,470$), maka H_5 diterima.

Dengan demikian tingkat pendidikan, penyuluhan mengenai pajak, tingkat pendapatan dan kelompok umur secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, hipotesis kelima pada penelitian ini diterima yang artinya secara bersama-sama ada pengaruh signifikan antara tingkat pendidikan penyuluhan mengenai pajak tingkat pendapatan dan kelompok umur sama-sama berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Hasil didukung oleh penelitian Heri Suneni (2010) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan, penyuluhan mengenai pajak, tingkat pendapatan dan kelompok umur berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4.5.3 Koefisien Determinasi

Tabel IV.13 Hasil Regresi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.804 ^a	.646	.631

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel IV.13 diatas, diperoleh nilai R^2 (*R Square*) sebesar 0,646 atau 64,6%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (tingkat pendidikan, penyuluhan mengenai pajak, tingkat pendapatan dan kelompok umur) terhadap variabel dependen (partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan) sebesar 64,6%. Atau partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di pengaruhi oleh tingkat pendidikan, penyuluhan mengenai pajak, tingkat pendapatan dan kelompok umur sebesar 64,6%. Sedangkan sisanya sebesar 35,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar .

Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi linier berganda yang telah dijelaskan pada Bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis kesatu menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, yaitu terlihat dari nilai t hitung sebesar -0.018 dengan nilai t tabel $1,986$ atau $(-0.018 < 1,986)$, maka H_1 ditolak, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat, dapat disimpulkan hipotesis kesatu ditolak atau menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Oleh sebab itu kensekuensi tingkat pendidikan yang memadai harus dimiliki oleh masyarakat sebagai wajib pajak karna dengan pendidikan yang memadai akan turut menciptakan kelancaran dalam membayar pajak.

2. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa penyuluhan mengenai pajak berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, yaitu terlihat dari nilai t hitung sebesar 2,022 dengan nilai t tabel 1,986 atau $(2,022 < 1,986)$, maka H_2 diterima, artinya secara parsial berpengaruh signifikan antara penyuluhan mengenai pajak dengan partisipasi masyarakat, dapat disimpulkan H_2 diterima dan terlihat bahwa penyuluhan mengenai pajak berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Oleh sebab itu semakin baik dan sering aparat perpajakan mengadakan penyuluhan mengenai pajak maka masyarakat juga akan lebih paham dan mengerti tentang arti dan fungsi pajak.
3. Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, yaitu terlihat dari nilai t hitung sebesar 2,915 dengan nilai t tabel 1,986 atau $(2,915 > 1,986)$, maka H_3 diterima, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara tingkat pendapatan dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, dapat disimpulkan H_3 diterima dan terlihat bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Semakin baik tingkat pendapatan masyarakat maka partisipasi masyarakat dalam membayar pajak juga semakin baik.

4. Pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa kelompok umur berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, yaitu terlihat dari nilai t hitung sebesar 9,830 dengan nilai t tabel 1,986 atau $(2,830 > 1,986)$, maka H_4 diterima, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara tingkat pendapatan dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, dapat disimpulkan H_4 diterima dan terlihat bahwa kelompok umur berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Karna kematangan pola pikir dalam usia seseorang sangat mewarnai penguasaan dan pemahaman atas berbagai sistem dan prosedur yang berkaitan dengan penerimaan PBB.
5. Hasil pengujian secara bersama-sama (uji F) menerima hipotesis ke lima, yaitu terlihat dari F hitung 42,450 dan F table 2,470 atau $(42,450 > 2,470)$, maka H_5 diterima, dengan signifikan 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha=5\%$. Dapat disimpulkan bahwa secara bersama sama antara tingkat pendidikan penyuluhan mengenai pajak tingkat pendapatan dan kelompok umur mempunyai pengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

5.2 Keterbatasan

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Faktor-faktor yang digunakan untuk menguji partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih terbatas .
2. Responden yang digunakan dalam penelitian hanya fokus pada 1 instansi saja.
3. Karena menggunakan kuesioner kemungkinan ada suatu respon bias dari responden yang dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain (1) kemungkinan responden tidak menjawab secara serius atau tidak jujur, (2) kemungkinan responden tidak mengerti dengan pertanyaan yang ada di kuesioner.

5.3 Saran- saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu agar dapat lebih meningkatkan partisipasinya dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan observasi (pengamatan) langsung kepada objek untuk menghindari bias respon dan lebih memperluas wilayah penelitian.

3. Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain sebagai variabel independen maupun moderating untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 29

Alex, 2005, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*. Surabaya : Karya Harapan.

Al Amin, Muhammad., 2003 *Skripsi (Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bina Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan)*, Pekanbaru : UNRI.

Ahmad Tjahjono, 2005, *Perpajakan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.

Crenamaretha, 2009, *penyuluhan perpajakan*, University Petra Christian : Surabaya.

Davis, Keith dan Jhon W. Nestrom., 2007. *Prilaku dalam Organisasi*. Jakarta : Erlangga.

Dwi Priyanto, 2009, *Mandiri Belajar SPSS*, PT. Mediakom : Yogyakarta.

Fidel, 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Edisi1, Penerbit Murai kencana, Jakarta.

Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi IV, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Heri Suneni, 2010. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Pekanbaru : UIN Suska.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*, BPFE, Yogyakarta.

Kho, Josef Riwu., 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Indrianto, Supomo., 2002, *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE : Yogyakarta.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2008, CV. Andi : Yogyakarta

Malihot Pahala Siahaan., 2009. *Pajak Bumi & Bangunan di Indonesia teori dan Praktik*. Graha Ilmu : yogyakarta

Pandiangan, liberty., 2002. *Pemahaman praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Erlangga.

Pengabean, D., 1998. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Desa Hutan*. Medan : USU

Sonny Agustinus, 2009, *Panduan Praktis Perpajakan*, CV. Andi : Yogyakarta

Siti Kurnia Rahayu., 2010. *Perpajakan Teori dan teknis Perhitungan*, Graha Ilmu. Yogyakarta.

Santoso, Singgih, 2004, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, Cetakan Keempat, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.

Sugiyono., 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.

Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajak Indonesia Konsep & Aspek Formal*, Graha Ilmu : Yogyakarta.

Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat